

## Warga Marunda Tunggu Jawaban KLHK dan Kemenhub soal Polusi Debu Batu Bara

JAKARTA (IM) - Ketua Forum Masyarakat Forum Marunda (F-FRM), Didi Suwandi, mewakili warga Rusunawa Marunda memprotes pencemaran polusi debu batu bara di lingkungan mereka, mengatakan peluang gugatan hukum terbuka tetapi masih menunggu tanggapan dari Pemerintah Pusat.

"Sepertinya peluang itu (gugatan hukum) terbuka. Kami akan evaluasi sejauh mana tanggapan pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan," kata Didi Suwandi, Minggu (13/3).

Masyarakat Rusunawa Marunda akan menggelar aksi pada Senin (14/3), di kantor Kementerian Perhubungan untuk memprotes tata kelola pelabuhan yang dinilai gagal mengatur industri penghasil polusi debu batu bara dalam bentuk Flying Ash Bottom Ash (FABA).

"Apa yang terjadi di wilayah Rusunawa Marunda dan sekitarnya adalah jelas Pencemaran Lingkungan Hidup. Hal ini makin sering terjadi sejak 2018-2019. Kami juga pernah unjuk rasa di Pelabuhan Marunda, dan seolah tidak ada solusi karena dibiarkan hingga saat ini," bunyi pernyataan dalam siaran pers seruan aksi F-MRM.

Sebelumnya, Komis-

ioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti dan anggota DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak mengadakan pertemuan dengan warga Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pertemuan yang diadakan Jumat malam, 11 Maret 2022, mendengarkan keterangan warga dan menghasilkan rekomendasi KPAI.

"Pencemaran (debu) batu bara di Rusunawa Marunda sangat berdampak bagi kesehatan warga, terutama anak-anak, di antaranya gangguan pernapasan (ISPA), gatal pada kulit, dan bahkan ada anak yang kehilangan matanya," kata Retno, yang melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang terdampak pencemaran batu bara sehari sebelumnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, KPAI meneruskan laporan warga Rusunawa Marunda ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup turun tangan.

KPAI juga meminta WALHI Jakarta, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk melakukan advokasi dan pendampingan hukum kepada warga Rusunawa Marunda yang terdampak pencemaran debu batu bara. **yan**

## Pemprov DKI Kembali Buka Jalur Sepeda 'Pop Up' di Jalan Sudirman-Thamrin

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta kembali membuka jalur sepeda sementara atau pop up bike line di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin. Adapun pop up bike line tersebut nantinya akan dibuka pada setiap akhir pekan.

"Schubungan tingginya animo masyarakat untuk berolahraga pada hari Sabtu dan Minggu serta pada hari-hari libur nasional, maka dimulai pada tanggal 5 Maret 2022 dan seterusnya setiap hari Sabtu-Minggu dilaksanakan kembali (reaktivasi) pop up bike line di jalan Sudirman-Thamrin," demikian keterangan dari Instagram Dinas perhubungan DKI Jakarta, @dishubdkijakarta seperti dilihat, Minggu (13/3).

Diketahui, jalur sepeda sementara itu membentang dari kawasan Bundaran Senayan hingga Bundaran Patung Kuda dan boleh dilintasi mulai pukul 05.30-09.00 WIB.

Dishub DKI Jakarta menjelaskan, pihaknya akan membuat jalur tambahan di samping jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin.

"Teknisnya selain sudah adanya jalur sepeda terproteksi dengan menggunakan planter box dalam kondisi eksisting, dilakukan penambahan lajur tambahan," jelasnya.

Selain itu, petugas akan menempatkan traffic cone pada satu lajur lalu lintas sebagai pembatas. Tujuan-

nya supaya para pesepeda tak bercampur dengan kendaraan lainnya.

"Agar tidak terjadi conflict dengan kendaraan umum lainnya," terangnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 hingga 14 Maret 2022 mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada penularan serta melakukan vaksinasi dosis ketiga.

"Tetap dijaga kesehatannya, disiplin prokes, dan lakukan vaksinasi lengkap. Untuk masyarakat yang sudah dapat tiket vaksin ketiga, segera lakukan vaksinasi. Insyaallah, dengan upaya-upaya pencegahan ini dapat membantu mengurangi dampak keterpaparan, dan kita dapat segera melewati pandemi ini dengan baik," kata Anies Baswedan melalui keterangan tertulis, Kamis (10/3).

Adapun ketentuan PPKM level 2 ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 191 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. **yan**

## JPOS Phinisi Dipadati Pengunjung hingga Sempat Overload

JAKARTA (IM) - Jembatan penyeberangan orang dan sepeda (JPOS) Phinisi sudah dibuka secara umum. JPOS yang terletak di Karet, Sudirman, Jakarta Selatan ini sontak mengundang decak kagum warga ibu kota yang sekadar penasaran atau ingin berselfie ria bersama keluarga.

Tampak JPOS yang terbuka tidak hanya untuk pejalan kaki namun juga para pesepeda menjadikannya titik spot wisata baru bagi warga yang sedang berolahraga pagi di sekitaran Sudirman.

Selain itu, di setiap ujung jembatan, terdapat elevator yang diperuntukkan bagi kaum disabilitas, pesepeda atau warga yang tidak mau repot menaiki tangga.

Pada puncak JPOS tersebut, terdapat sebuah balkon yang menarik untuk dijadikan titik pengambilan gambar pemandangan jalanan Sudirman. Akan tetapi, balkon tersebut dibatasi jumlah pengunjungnya hingga kapasitas 50 orang. Tak heran alarm peringatan overload sering berbunyi

saat pengunjung datang lilih berganti.

Kiranya bentuk balkon itulah yang indah berbentuk geladak di sebuah kapal Phinisi.

Bak ibarat nahkoda ulung, banyak warga berpose foto di ujung balkon sembari membentangkan tangan seperti film Titanic.

Pengunjung yang datang tidak hanya dari kalangan warga yang berolahraga, namun juga keluarga atau pasangan muda-mudi yang hendak menghabiskan 'quality time' sembari berselfie ria. Sedangkan bagi masyarakat yang menaiki kendaraan roda dua, mereka memarkir motornya tepat persis di depan Gedung Mayapada untuk sekadar ingin tahu indahnya JPOS Phinisi tersebut.

Dari warna penyangga hingga anak tangga dibalut lapisan cat berwarna cokelat dan terkesan hanya ditemplei lapisan kayu. Pemandangan kapal laut tak akan mungkin tidak singgah di setiap benak pengunjung yang menikmati pemandangan di sekitar JPOS. **yan**

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



## OLAH RAGA MINGGU PAGI

Warga bersama DPC PORPI berbadan hukum melaksanakan senam pagi di kawasan hutan kota Bekasi, Minggu (13/3). Seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19, masyarakat mulai beraktivitas normal dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

SERING TIMBULKAN BAU TAK SEDAP

## Komisi B DPRD DKI Minta Perumda Dharma Jaya Kelola Limbah RPH Pulogadung

Persoalan limbah ini tidak bisa diabaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, selain mengganggu dengan pencemaran bau tak sedap, dikhawatirkan limbah potong hewan tersebut menimbulkan penyakit bagi masyarakat.

JAKARTA (IM) - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Perumda Dharma Jaya memiliki pengolahan limbah dari Rumah Potong Hewan (RPH) Pulogadung, Jakarta Timur.

Pasalnya limbah dari RPH

tersebut seringkali dikeluhkan warga sekitar karena kerap menimbulkan bau tak sedap di lingkungan.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, persoalan ini tidak bisa diabaikan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, selain mengganggu dengan pencemaran bau tak sedap, dikhawatirkan limbah potong hewan tersebut menimbulkan penyakit bagi masyarakat.

"Beberapa Rumah Potong Hewan yang limbahnya itu agak sedikit mengganggu lingkungan, contoh yang di Pulogadung. Mungkin limbah dari bau ternak yang dipotong ini juga perlu pengolahan tersendiri," kata Gilbert dikutip dari siaran Pers DPRD DKI Jakarta, Minggu (13/3).

Sejauh ini, Gilbert mengaku sudah pernah mengkoordinasikan persoalan tersebut

dengan Perumda Dharma Jaya. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut mengenai rencana kerja yang akan dilakukan perusahaan pelat merah milik DKI tersebut untuk mengatasi persoalan itu.

"Tidak ada ketentuan memang harus berapa jarak RPH dari Perumahan. Akhirnya masyarakat yang tinggal dekat RPH betul-betul merasakan bau dari sisa pemotongan yang sangat mengganggu dan kadang membusuk," ungkapnya.

Gilbert berharap seluruh RPH mampu mengelola limbahnya sendiri seperti yang telah diterapkan RPH Cakung sejak tahun 2018 silam. Di mana kotoran dan sisa jerami makanan sapi mampu diolah menjadi pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

DKI Jakarta.

Sementara untuk RPH Kapuk yang menangani babi dan RPH Pulogadung yang menangani unggas belum menerapkan pengelolaan limbah secara baik.

Sementara, Direktur Utama Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengakui telah berupaya untuk meminimalisir aroma tak sedap dengan mengangkut kotoran dan bangkai ayam maupun babi yang mati setiap hari.

"Penanganan limbah sebenarnya sudah kita antisipasi dengan pengangkutan setiap hari dengan truk yang datang kesana untuk mengangkut ayam-ayam yang mati dan segala macam. Tapi memang hasilnya tidak akan bisa 100 persen tetap masih akan ada bau," tandasnya. **yan**

## Pedagang Ikan Bakar Tolak Relokasi ke Resto Apung Muara Angke

JAKARTA (IM) - Pembangunan Resto Apung Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara telah rampung direvitalisasi. Namun, di balik rampungnya Resto Apung, banyak pedagang ikan bakar mengecam akan kebijakan tersebut.

Revitalisasi yang mulanya bertujuan merelokasi pedagang Pusat Jajanan Serba Ikan (Pujaseri) dari tempat penampungan, justru dikecam salah seorang pedagang ikan Bakar. Alhasil, penolakan itu berbuah viral di media sosial.

Heni Puspita (35), salah seorang pedagang ikan bakar menilai, relokasi yang mulanya bertujuan untuk membantu para pedagang, kini lebih bersifat komersial. Serta menunjukkan bentuk intimidasi pengelola kepada para pedagang.

"Bentuk intimidasinya itu satu kita dipaksa naik ke resto apung itu dengan deposit 9

juta. Dan itu harus wajib. Kita juga dipaksa belanja diwajibkan di dalam," kata Heni, Sabtu (12/3).

Menurut dia, para pedagang yang nantinya berjualan di Resto Apung tidak mendapatkan keleluasaan. Pihak koperasi, justru mewajibkan pedagang untuk berbelanja kebutuhan di sekitar area tersebut. "Kita tidak boleh beli barang baku di luar," ujarnya.

Ketua Komunitas Pedagang Ikan Bakar (Kibar), Ndam Hamdani ikut berkomentar. Ia mengecam pihak pengelola agar berpikir ulang mengenai kebijakan yang tidak disosialisasikan. Sebab, hal itu sangat merugikan para pedagang ikan bakar.

"Kami menolok adanya deposit 9 juta. Kalau menurut saya itu konyol, sebagai wadahnya jadi tidak habis pikir, ketika ingin menarik deposit

kenapa tidak bilang dari awal," ucapnya.

Menurut Ndam, pihak pengelola langsung memberikan aturan pembayaran tanpa adanya proses sosialisasi. Padahal, dalam rapat yang diadakan pengelola ia pun turut hadir. Namun, kebijakan itu dirasa sangat membebani para pedagang.

"Saya menghadiri waktu itu tanggal 2 Maret, saya pikir ini acara perkenalan. Ternyata itu langsung membuat peraturan pengelola kepada kita. Bahwa begitu masuk dikenakan deposit 9 juta," timpal Ndam.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah meresmikan Resto Apung Muara Angke pada Minggu (11/10/2020). Peresmian Resto Apung ini dalam rangka pemberdayaan pedagang kuliner Ikan Bakar agar lebih rapi dan tertata dengan baik. **yan**

## Komitmen Tangani Stunting, Pemkab Bekasi Akan Bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RANPASTI) yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di The Trans Luxury Hotel, Batununggal, Bandung, Jum'at (11/3).

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten pada pertengahan bulan Maret, guna menekan kasus dan pencegahan stunting di Kabupaten Bekasi. Hal ini disampaikan oleh Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, saat menghadiri acara Sosialisasi

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RANPASTI) yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Acara berlangsung di The Trans Luxury Hotel, Batununggal, Kota Bandung, pada Jumat (11/3).

"Sesuai dengan arahan Pak Wakil Gubernur, kami

memenuhi gizi yang baik bagi keluarga, guna menghindari meningkatnya kasus stunting.

"Banyak hal yang kita lakukan, mulai dari memberikan edukasi kepada para ibu-ibu untuk memenuhi gizinya untuk anak-anaknya, memberikan asi eksklusif untuk bayinya, mampu merawat dengan baik," katanya.

Plt. Bupati Bekasi juga menjelaskan bahwa, pencegahan stunting sangat penting dilakukan, karena stunting merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masa depan sebuah negara. Ia juga menerangkan stunting dapat dicegah sejak remaja, pra nikah, dan ibu hamil.

"Ini sangat penting dilakukan untuk mencegahnya, karena stunting suatu kondisi kesehatan yang menyangkut masa depan sebuah negara. Dapat dicegah dimulai dari remaja, pra nikah dan ibu hamil," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum, yang juga membuka secara resmi acara tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Pemerintah

Pusat dan Daerah. Dalam mendukung hal tersebut menjadi zero kasus, diperlukan pula adanya akselerasi dan visi misi di wilayah masing-masing.

"Diperlukan adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk program pencegahan bertambahnya stunting. Para Bupati/Walikota diharapkan memiliki akselerasi dan visi misi untuk mendukung ini menjadi zero kasus," pungkasnya.

Tidak hanya itu, Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Ridwan Kamil, menyampaikan dukungan dan dorongannya dalam mengatasi masalah stunting dengan 3 hal, yakni pola asuh, pola makan dan sanitasi. Ia menuturkan, BKKBN pun memiliki Tim Pendamping Keluarga yang beranggotakan Kader KB, Kader PKK dan gabungan bidang di wilayah masing-masing.

"Dari 10 program PKK mencakup kehidupan masyarakat, seperti adanya program ini akan didorong oleh 3 hal, juga kami bersama BKKBN memiliki Tim Pendamping Keluarga yang berasal dari Kader KB, Kader PKK dan gabungan bidang-bidang." tuturnya. **mdl**

FOTO: ANT



## DUNIA OLAH RAGA MENUJU TRANSISI ENDEMI

Warga berolahraga di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/3). Seiring transisi dari pandemi menuju endemi, pemerintah telah mengizinkan seluruh kompetisi olahraga di Indonesia dapat dihadiri penonton hingga 100 persen dengan syarat sudah vaksinasi booster dan mengunduh aplikasi PeduliLindungi.